

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Kualitas Perencanaan, DIPA yang Berkualitas, dan Perencanaan Kas yang Akurat

Muhammad Ihsan¹, Cris Kuntadi²

¹ Muhammad Ihsan, Politeknik STIA LAN Jakarta, email: ihsan.baga@yahoo.com

² Cris Kuntadi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding Author: Muhammad Ihsan*

Abstract: Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian atau artikel ilmiah. Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variabel faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran, yaitu Kualitas Perencanaan, Kualitas Dipa, Kas yang Akurat dan Perencanaan. Abstrak berisi bagian-bagian sebagai berikut.

Tujuan - Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk membangun hipotesis pengaruh antara Penyerapan Anggaran, yaitu Kualitas Perencanaan, Kualitas Dipa, Kas yang Akurat dan Perencanaan yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Desain/metodologi/pendekatan - Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif dan penelitian kepustakaan yang mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal-jurnal baik secara offline di perpustakaan maupun secara online.

Temuan - Hasil dari artikel tinjauan pustaka ini adalah: 1) Ekspor berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran; 2) Defisit Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran; dan 3) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.

Keterbatasan/implikasi penelitian - Terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Penyerapan Anggaran selain Kualitas Perencanaan, Kualitas Dipa, Kas yang Akurat dan Perencanaan.

Implikasi praktis - Membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran dan menemukan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Penyerapan Anggaran.

Keaslian/nilai tambah - Memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antara Penyerapan Anggaran, Kualitas Perencanaan, Kualitas Dipa, Kas yang Akurat dan Perencanaan.

Keyword: Utang Negara, Ekspor, Defisit Anggaran, dan Belanja Pemerintah.

Pendahuluan

Latar Belakang

Reformasi penganggaran di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah mensyaratkan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan anggaran pemerintah harus didasarkan pada pendekatan kinerja yang pada intinya menitikberatkan pada terciptanya efisiensi dan efektivitas rencana kerja dan anggaran pada masing-masing kementerian/lembaga. Akan tetapi pelaksanaan anggaran kinerja yang mengusung semangat reformasi keuangan negara belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Salah satu indikasinya adanya penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran, yang mana pola penyerapan APBN baru dipacu pada semester kedua, tepatnya pada triwulan ke IV. Hal ini akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan pengertian penyerapan yang dimaksud di sini adalah realisasi dari anggaran. Secara umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu, dipandang pada suatu saat tertentu. Secara lebih mudah orang awam mengatakan pencairan anggaran.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. (Putri, 2014).

Menurut Halim (2014: 84), penyerapan anggaran merupakan salah satu kemampuan suatu kementerian/lembaga dalam memaksimalkan penggunaan daya keuangan yang ada. Keterlambatan penyerapan anggaran secara ekonomis dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, hal ini perlu mendapat perhatian terutama untuk belanja barang dan belanja modal.

Rendahnya penyerapan anggaran perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran antara lain dari Kualitas Perencanaan, DIPA yang Berkualitas, dan Perencanaan Kas yang Akurat, hingga faktor-faktor internal dari pengguna anggaran. Pemerintah telah berupaya untuk mempercepat proses penyerapan anggaran antara lain dengan perbaikan kelembagaan, perbaikan bisnis proses, penataan sumber daya manusia hingga perbaikan penghasilan/remunerasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama yang berhubungan dengan proses penyerapan anggaran.

Usaha nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran antara lain diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Peraturan menteri keuangan tersebut memberikan pedoman kepada pengguna anggaran dalam melakukan perencanaan penarikan dana. Dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan anggaran satuan kerja (Satker). Namun kenyataannya proyeksi/perencanaan penarikan dana yang dilaporkan satker tidak akurat, bahkan terdapat satker yang tidak melaporkan rencana penarikan dana. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi yang nyata apabila satker tidak mengirim laporan proyeksi penarikan dana.

Karya ilmiah merupakan sebagai salah syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada sebagian besar Perguruan Tinggi di Indonesia. Ketentuan ini berlaku untuk semua level jenjang pendidikan yaitu Skripsi strata satu (S1), Tesis strata dua (S2) Disertasi strata tiga (S3).

Berdasarkan pengalaman peneliti yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan diperlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas pengaruh Ekspor, Defisit Anggaran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Utang Negara, suatu studi literature review dalam bidang Manajemen Keuangan Negara.

Berdasarkan pengalaman empirik banyak mahasiswa dan author yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas pengaruh Kualitas Perencanaan, DIPA yang Berkualitas, dan Perencanaan Kas yang Akurat, terhadap penyerapan anggaran, suatu studi *literature review* dalam bidang manajemen keuangan negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Kualitas Perencanaan Anggaran berpengaruh kepada Penyerapan Anggaran?
2. Apakah DIPA yang Berkualitas berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
3. Apakah Perencanaan Kas yang Akurat berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?

Kajian Teori

Penyerapan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran adalah sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Selain itu anggaran berfungsi sebagai alat kontrol atau pengawasan, baik terhadap pendapatan maupun pengeluaran pada masa yang akan datang.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

Kondisi penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional (Milasih, 2012) akan berimplikasi pada:

1. Lambatnya pelaksanaan kegiatan/program pemerintah dan akan berpengaruh kepada pelayanan publik
2. Penundaan pencairan dana untuk belanja barang/jasa menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan *multifiler effect* dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian Masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran;
3. Penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang berat terhadap penyediaan uang/kas pemerintah, sehingga memungkinkan terjadi *cash mismatch*.

Kualitas Perencanaan

Perencanaan merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan menentukan seluruh aktivitas yang perlu dan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk merealisasikan perencanaan dibutuhkan anggaran (L. Gagola et al., 2017).

Dalam perspektif lain, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Ramdhani & Anisa, 2017). Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya terutama berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah telah merencanakan target-target pembangunan dimasa mendatang.

DIPA yang Berkualitas

DIPA merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL yang disusun oleh Kementerian/Lembaga beserta Satker di bawahnya. Dalam DIPA memuat informasi meliputi Fungsi, Sub Fungsi, Program, Hasil, Indikator kinerja Utama Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama Kegiatan, Keluaran, jenis Belanja, Alokasi Anggaran, Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan per bulan. Selain itu dalam suatu DIPA harus disertai dokumen pendukung yang memadai seperti TOR, RAB dan dokumen lainnya. Oleh karena itu semakin baik dan lengkap informasi dan dokumen dalam suatu DIPA maka semakin baik kualitas DIPA. (Seftianova, 2013).

Kualitas DIPA ditunjukkan antara lain dengan ketepatan waktu dalam menerima DIPA, tidak adanya kesalahan dalam DIPA, tidak adanya revisi DIPA, tidak adanya tanda bintang dan lain-lain. Selama ini, penerimaan DIPA telah dilakukan tepat waktu sehingga memasuki awal tahun anggaran berjalan telah dapat dilaksanakan. Namun untuk terjadinya kesalahan dan revisi DIPA merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan jika ada revisi maka akan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga sisa anggaran tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun. Selain itu jika dilakukan revisi maka program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan sampai dengan persetujuan atas revisi di tetapkan.

Oleh karena itu setiap Kementerian dan Lembaga dalam penyusunan DIPA harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan (RKA-KL). Disamping itu KPPN juga harus berperan aktif dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Satker yang ada dengan memberikan pemahaman akan pentingnya peningkatan kualitas DIPA. Makin meningkatnya kualitas DIPA diharapkan tidak terjadinya revisi DIPA. Dengan tidak adanya revisi maka kegiatan dan program dapat dilaksanakan lebih awal. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih awal maka pencairan anggaran juga dapat dilakukan lebih awal. Kondisi ini pada akhirnya akan dapat mewujudkan realisasi anggaran secara proporsional.

Perencanaan Kas yang Akurat

Perencanaan Kas merupakan bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran. Dengan adanya perencanaan kas yang baik dan akurat akan memberikan kepastian ketersediaan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sebaliknya perencanaan kas yang buruk dan tidak berkualitas akan mengakibatkan penyerapan anggaran yang tidak proporsional. Oleh karena itu akurasi perencanaan kas akan menjamin keberlangsungan kegiatan pemerintah yang dapat di biayai.

Perencanaan Kas sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan negara yang terbatas sehingga dengan perencanaan kas pemanfaatan anggaran pemerintah dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu perencanaan Kas merupakan strategi manajemen kas guna memastikan bahwa pemerintah memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Dengan demikian dengan perencanaan kas yang akurat sangat mendorong terwujudnya peningkatan penyerapan anggaran. (Seftianova, 2013)

Untuk mewujudkan perencanaan kas yang akurat perlu didukung partisipasi dan komitmen yang kuat dari seluruh Satker. Dalam konteks ini perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh satker sehingga pada akhirnya akan mewujudkan pemahaman satker akan pentingnya perencanaan kas. Oleh karena itu komitmen bersama semua stakeholder, mulai dari pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan pada satker. Hal ini tidak hanya sebatas mengimplemetasikan perancanaan kas, tetapi juga menjaga akurasi perencanaan kas sehingga penyerapan anggaran semakin berkualitas.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Dian Juliani, Mahfud Sholihin (2014)	Perencanaan anggaran dan kualitas SDM pengaruh positif terhadap tingkat Penyerapan Anggaran	Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	Pengaruh Kualitas SDM terhadap Penyerapan Anggaran
2	Tessa Sanjaya (2014)	Variabel regulasi keuangan daerah, politik anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran	-	Pengaruh Variabel Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran, dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran
3	Kadek Mia Ranisa Putri (2017)	Perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran	Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	Pengaruh Kualitas SDM dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran
4	Dadan Ramdhani, Indi Zaenur Anisa (2017)	Perencanaan anggaran, kualitas SDM, Pelaksanaan anggaran mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran	Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	Pengaruh Kualitas SDM dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran
5	Rifka Rifka Ramadhani (2019)	Regulasi, Perencanaan anggaran dan Pengadaan barang/Jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat	Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

6	Ramadhani (2019)	Penyerapan dana dapat secara positif dan nyata dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang cermat	Pengaruh perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	-
7	Rika Septi Rahmawati (2020)	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran	Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	Pengaruh Pelaksanaan Anggaran, Regulasi, SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran
8	Dwi Perwita Sari Sutono (2022)	Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja	Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	-
9	Adi Nugroho, D. (2023)	Perencanaan anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran	Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa serta Partisipasi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Metode Penulisan

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *offline* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

Pembahasan

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

1. Pengaruh Kualitas Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran

Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dimana dimensi atau indikator perencanaan anggaran sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah

proses untuk Menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu, perencanaan yang tidak matang menjadi salah satu factor penyebab minimnya penyerapan anggaran (Arif & Halkim, 2013).

Untuk meningkatkan Penyerapan anggaran dengan memperhatikan perencanaan anggaran, maka yang harus dilakukan manajemen adalah melakukan perencanaan anggaran dengan baik sesuai dengan sasaran, maka diharapkan penyerapan anggaran juga baik dimana menurut Dengan cara memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, mengidentifikasi dan melakukan percepatan kegiatan yang dapat segera dilakukan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana, dimana manajemen perlu melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat menghindari inefesiansse dan meningkatkan fleksibilitas (Zarinah,2016). Zarinah, M. (2016).

Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, apabila perencanaan anggaran dipersepsikan baik oleh pelanggan atau konsumen maka ini akan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang baik sesuai dengan sasaran, relevan dan terjadwal sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran. POerencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh : (Monik Zarinah,2016), (Rifka Ramadhani,2019).

2. Pengaruh DIPA yang Berkualitas terhadap Penyerapan Anggaran

Menurut Seftianova (2013), kualitas DIPA atau DPA berkaitan erat dengan perencanaan dan penyerapan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut dengan memenuhi kriteria di bawah ini:

1. Ketepatan waktu dalam menerima DIPA.

Dengan langkah-langkah ketepatan waktu dalam menerima daftar isian pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah diterimanya SP RKAKL.
- b. Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun jadwal validasi DIPA Kementerian Negara/ Lembaga dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama Kementerian Negara / Lembaga.
- c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama memerintahkan para KPA satker agar menyampaikan DIPA atau DPA dan ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan.
- d. Direktur Jenderal Perbendaharaan memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun jadwal validasi DIPA dan disampaikan kepada KPA satker di wilayah kerjanya.
- e. Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima DIPA dan ADK satker, selanjutnya melakukan validasi dengan mencocokkan DIPA dengan ADK satker dan mencocokkan ADK dengan data Keppres mengenai rincian APBN yang terdapat dalam database RKAKL-DIPA.

2. Tidak adanya kesalahan dalam DIPA.

Setelah DIPA disahkan dan diterima oleh KPA, KPA berkewajiban melakukan pemeriksaan kembali terhadap DIPA untuk memastikan bahwa DIPA yang diterima telah sesuai dengan SP RKAK/L dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Penelitian dimaksud meliputi antara lain kode dan nomenklatur satker, pejabat perbendaharaan, kode kantor bayar, kode kewenangan, kode lokasi, sumber dana, jenis belanja, cara penarikan, jumlah pagu anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan jumlah anggaran yang diblokir. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan, maka segera disampaikan kepada Kantor Pusat/Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dilakukan revisi/penyesuaian seperlunya sesuai kewenangan. Hal tersebut perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatannya, satker tidak mengalami hambatan sehingga penyerapan anggaran dapat dimulai secepatnya sejak awal tahun anggaran.

3. Tidak diperlukannya revisi DIPA

Revisi DIPA yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan pergeseran rincian anggaran pada DIPA tahun berjalan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan pagu, perubahan kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun dan informasi lain dalam format DIPA. Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2014. Sesuai standar pelayanan penyelesaian revisi anggaran Non APBN-Ppada DJA, yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-28/AG/2014, jangka waktu penyelesaian usulan revisi ditetapkan 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap (untuk usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan). Namun demikian, penyelesaian revisi DIPA ini tidak memperhitungkan revisi yang diakibatkan adanya kebijakan pemotongan APBN. Hal tersebut disebabkan persetujuan dari DPR yang serta lama diterima DJA, penyusunan konsep nota dinas yang cukup memakan waktu (mencantumkan alasan pemotongan), masih adanya perbedaan persepsi antar kanwil DJPB dalam menyikapi revisi DIPA yang diakibatkan pemotongan anggaran dan revisi DIPA dilakukan karena tidak sesuai dengan kebutuhan.

4. Tidak adanya tanda bintang

Apabila DIPA perlu revisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan maka anggaran kegiatan diblokir/ tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPRD hal akan membuat dana anggaran tidak dapat di cairkan maka lebih baik tidak ada tanda bintang dalam DIPAmaka sangat perlu untuk tidak ada tanda bintang di dokumen perencanaan atau DIPA pada satker.

Berikut adalah beberapa pengaruh DIPA yang berkualitas terhadap penyerapan anggaran:

1. Ketepatan dan Keterbukaan Aloasi Anggaran

DIPA yang berkualitas mencakup alokasi anggaran yang tepat untuk program dan proyek yang telah direncanakan. Ini memastikan bahwa dana tersedia untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Selain itu, DIPA yang berkualitas juga harus transparan, sehingga semua pihak dapat melihat bagaimana alokasi anggaran dilakukan.

2. Menghindari Keterlambatan Penyaluran Anggaran

DIPA yang disusun dengan baik harus memperhitungkan waktu pelaksanaan program atau proyek. Dengan demikian, anggaran dapat disalurkan tepat waktu, menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan program yang dapat mengganggu penyerapan anggaran.

3. Pengendalian Anggaran yang Lebih Baik

DIPA yang berkualitas memungkinkan pengendalian anggaran yang lebih baik karena rencana penggunaan anggaran telah didefinisikan secara jelas. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Mendorong Akuntabilitas

Dengan menyajikan alokasi anggaran dan tujuan program dengan jelas, DIPA yang berkualitas dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran akan lebih mudah untuk dipantau dan dievaluasi.

5. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

DIPA yang berkualitas dapat membantu dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan yang matang untuk menghindari pemborosan sumber daya.

6. Kepatuhan terhadap Aturan dan Regulasi

DIPA yang berkualitas harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Ini membantu dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan hukum dan etika.

7. Penghindaran Kesalahan atau Pemborosan Anggaran

DIPA yang berkualitas dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi kesalahan atau pemborosan anggaran sebelum terjadi. Ini memungkinkan tindakan koreksi yang cepat.

8. Peningkatan Kepuasan Pemangku Kepentingan

Dengan menggunakan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam DIPA, pemerintah dapat memenuhi janjinya kepada pemangku kepentingan seperti warga negara, mitra donor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran, penting untuk memastikan bahwa DIPA disusun dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Pengaruh Perencanaan Kas yang Akurat terhadap Penyerapan Anggaran

Menurut Seftianova (2013), Perencanaan Kas yang Akurat berkaitan erat dengan perencanaan dan penyerapan anggaran. Perencanaan kas yang akurat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyerapan anggaran dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah.

Berikut adalah beberapa pengaruh positif perencanaan kas yang akurat terhadap penyerapan anggaran:

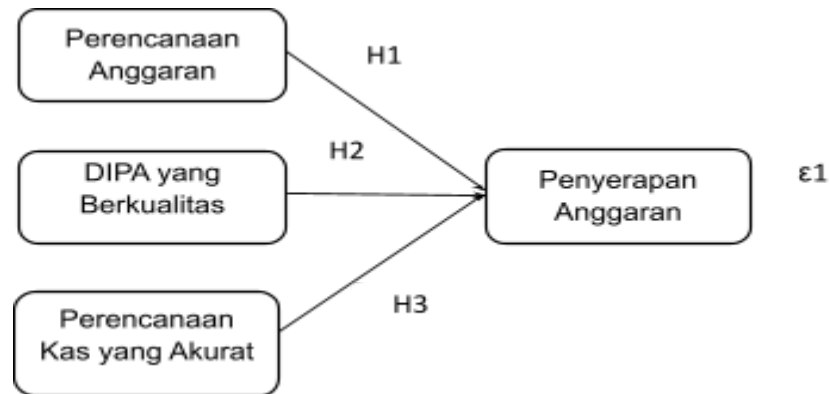
1. Pengelolaan Likuiditas yang Optimal: Perencanaan kas yang akurat membantu pemerintah mengelola likuiditasnya dengan baik. Ini berarti pemerintah dapat

- mengantisipasi kebutuhan kas yang akan datang dan memastikan bahwa dana yang cukup tersedia untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
2. Pencegahan Keterlambatan dalam Penyaluran Anggaran: Dengan merencanakan kas secara efektif, pemerintah dapat menghindari keterlambatan dalam penyaluran anggaran. Hal ini penting karena keterlambatan dalam penyaluran anggaran dapat mengganggu pelaksanaan program dan proyek yang telah direncanakan.
 3. Pengelolaan Utang yang Lebih Baik: Perencanaan kas yang akurat membantu pemerintah dalam mengelola utangnya dengan lebih baik. Pemerintah dapat merencanakan pembayaran utang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat berdampak buruk pada reputasi pemerintah.
 4. Menghindari Kekurangan Dana: Salah satu dampak negatif dari perencanaan kas yang tidak akurat adalah kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program dan proyek. Dengan merencanakan kas dengan baik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang diperlukan tersedia pada saat diperlukan.
 5. Peningkatan Kepuasan Pemangku Kepentingan: Perencanaan kas yang akurat dapat meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor, dan kreditur. Hal ini karena pemerintah menunjukkan kemampuannya untuk mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi komitmennya.
 6. Pengendalian Risiko Keuangan: Dengan merencanakan kas secara akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keuangan yang mungkin timbul, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga.
 7. Mendukung Pemenuhan Kewajiban Keuangan: Perencanaan kas yang akurat membantu pemerintah memenuhi kewajiban keuangan yang telah ditetapkan, termasuk pembayaran gaji pegawai dan pelayanan utang.
 8. Pengelolaan Kelebihan Dana dengan Efisien: Selain menghindari kekurangan dana, perencanaan kas yang akurat juga membantu pemerintah mengelola kelebihan dana dengan efisien. Dana yang tidak digunakan dapat diinvestasikan atau digunakan untuk membiayai program dan proyek tambahan.

Dengan demikian, perencanaan kas yang akurat merupakan aspek yang krusial dalam memastikan bahwa penyerapan anggaran berjalan lancar dan efisien. Hal ini membantu pemerintah dalam menjalankan operasionalnya dengan baik, memenuhi kewajiban keuangan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, perencanaan anggaran, DIPA yang berkualitas, dan perencanaan kas yang akurat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi penyerapan anggaran, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- Kualitas SDM: Dian Juliani, Mahfud Sholihin (2014)
- Variabel Regulasi Keuangan Daerah: Tessa Sanjaya (2014)
- Politik Anggaran: Tessa Sanjaya (2014)
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa: Tessa Sanjaya (2014)
- Komitmen Organisasi: Kadek Mia Ranisa Putri (2017)
- Penyerapan Dana: Ramadhani (2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

- Perencanaan anggaran berpengaruh positif kepada Penyerapan Anggaran
- Sumber daya Manusia berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran
- Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran, selain dari kualitas perencanaan, DIPA yang berkualitas, dan perencanaan kas yang akurat pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran selain variabel yang di teliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti kualitas SDM, pengaruh regulasi, politik anggaran dan komitmen organisasi.

Daftar Pustaka

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2022), Petunjuk teknis Penilaian Indikator Kinerja Belanja Negara /Lembaga.
- Kuntadi C., & Adi Nugroho, D. (2023), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa serta Partisipasi Anggaran, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i3.1330>
- Arif, E. & A. Halim. (2013). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill," 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muh, syam. 2012. Teori dan Konsef, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul.2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Monik Zarinah (2016). Pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya Manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Aceh Utara, Jurnal Magister Akuntansi, Universitas Syiah Kuala.
- Putri Carlin Tasya. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Tesis Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 10, 134–147.
- Rifka Ramadhani (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Eksplorasi Akuntansi.
- Seftianova, Ratih. 2013. Pengaruh Kualitas DIPA Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah Kppn Malang.Jrak Vol. 4 No.1 Februari 2013 H.